

Nama : Mega Marsanda Putri
Npm : 2413031054
Kelas : 2024 B
Matkul : Teori Akuntansi

STUDI KASUS PERTEMUAN 4

PT Garuda Sejahtera adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan. Dalam laporan keuangan terbarunya, perusahaan mengakui pesawat-pesawat yang dimiliki berdasarkan nilai wajar (fair value) sesuai dengan pendekatan IFRS (International Financial Reporting Standards).

Namun, auditor memberikan catatan bahwa penentuan nilai wajar tersebut tidak mencerminkan kondisi pasar di Indonesia secara akurat, karena pasar aktif untuk pesawat di Indonesia sangat terbatas. Auditor menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan penggunaan biaya historis (historical cost) yang lebih konservatif.

Sementara itu, PT Garuda Sejahtera menyatakan bahwa pendekatan nilai wajar lebih mencerminkan "substance over form" dan kebutuhan investor global, karena perusahaan ingin menarik investor asing. Dalam penyusunannya, perusahaan mengacu pada kerangka konseptual IFRS, bukan kerangka konseptual PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Beberapa anggota dewan komisaris mempertanyakan:

1. Apakah penggunaan kerangka konseptual global (IFRS) sah diterapkan untuk perusahaan di Indonesia?
2. Apakah kerangka konseptual PSAK sudah cukup memadai untuk menjawab dinamika bisnis global?
3. Apakah nilai wajar benar-benar mencerminkan realitas ekonomi yang bisa diandalkan dalam konteks Indonesia?

Pertanyaan:

1. **Kritisi keputusan PT Garuda Sejahtera dalam memilih nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan secara konseptual dalam konteks Indonesia? Jelaskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual PSAK dan IFRS.**
2. **Bandungkan kerangka konseptual PSAK (Indonesia) dan IFRS dalam hal:**
 - Tujuan laporan keuangan
 - Karakteristik kualitatif informasi
 - Basis pengukuran
 - Asumsi entitas dan kelangsungan usaha
3. **Apakah Anda setuju bahwa Indonesia sebaiknya mengikuti sepenuhnya kerangka konseptual IFRS tanpa penyesuaian lokal? Jelaskan pendapat Anda dengan argumen kritis, mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan tingkat kematangan pasar di Indonesia.**

JAWABAN:

1. PT Garuda Sejahtera memilih untuk menerapkan nilai wajar sebagai dasar pengukuran pesawatnya, dengan merujuk pada IFRS yang menekankan konsep "substansi di atas bentuk" serta tuntutan pasar internasional, terutama demi menarik minat investor asing. Secara teori, penerapan nilai wajar bisa dibenarkan sejauh nilai tersebut dapat diukur dengan akurat dan mencerminkan keuntungan ekonomi di masa mendatang yang akan didapat dari aset-aset tersebut (kerangka konseptual IFRS).

Namun, di dalam konteks Indonesia, PSAK No.16 "Aset Tetap" yang berlaku saat ini memberikan pilihan antara metode biaya historis dan metode revaluasi (nilai wajar). Dalam kasus PT Garuda, pasar untuk pesawat di Indonesia sangat terbatas, sehingga perhitungan nilai wajar menjadi sulit dilakukan secara akurat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta distorsi pada laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor merekomendasikan penggunaan metode biaya historis yang lebih konservatif, karena dapat memberikan informasi yang lebih handal dalam konteks pasar Indonesia yang masih kurang matang dari segi likuiditas dan transparansi.

Dalam perspektif kerangka konseptual PSAK, prinsip paling penting adalah penyampaian laporan keuangan yang akurat dan relevan bagi para pengguna di Indonesia, sehingga pendekatan nilai wajar harus dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif. Apabila nilai wajar tidak mencerminkan kondisi pasar Indonesia dengan realistis, maka PSAK lebih mengedepankan nilai yang bisa diukur dengan dapat diandalkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap konservatif dan tidak menyesatkan bagi para pengguna. PT Garuda seharusnya mempertimbangkan prinsip ini dan memilih metode yang paling tepat sesuai dengan kondisi lokal sambil tetap berupaya konsisten dengan prinsip IFRS jika ada peluang.

2. Perbandingan Kerangka Konseptual PSAK dengan IFRS berdasarkan:

- **Tujuan Laporan Keuangan**

- PSAK: Tujuannya adalah untuk menyajikan data yang penting dan terpercaya bagi pemangku kepentingan dalam membuat keputusan keuangan, terutama di wilayah Indonesia. PSAK sering kali disesuaikan dengan keperluan dari pengguna lokal serta para pengawas, sehingga cara penyampaian informasi bisa sedikit berbeda dalam pengungkapan dan isi laporan keuangannya.
- IFRS: Misinya adalah untuk menawarkan informasi finansial yang berharga kepada para investor, kreditur, dan penyedia dana lainnya di seluruh dunia. Fokus utamanya adalah untuk membantu mereka dalam menentukan keputusan finansial terkait alokasi sumber daya kepada entitas yang melaporkan.

- **Karakteristik Kualitatif Informasi**

Kedua kerangka tersebut menekankan dua ciri utama: Relevansi dan Representasi yang Setia sebagai dasar dari kualitas informasi keuangan.

- IFRS mengutamakan karakteristik tambahan:

1. Materialitas
2. Netralitas

3. Keterbandingan (Comparability)
4. Konsistensi (Consistency)
5. Keterpahaman (Understandability)

➤ PSAK juga mengadopsi karakteristik ini, namun sering kali memberikan penekanan lebih pada keandalan berdasarkan prinsip konservatif yang sesuai dengan karakteristik pasar dan pengguna di Indonesia. PSAK mungkin memberikan perlakuan khusus terhadap informasi yang dapat diukur dengan andal, terutama dalam kondisi pasar yang belum aktif.

- **Basis Pengukuran**

- IFRS: Mendorong penerapan nilai wajar, khususnya untuk instrumen keuangan serta aset yang likuid, agar laporan keuangan mencerminkan keadaan ekonomi yang terkini. Namun, pasar aktif harus tersedia untuk memastikan bahwa nilai wajar benar-benar mencerminkan harga pasar.
- PSAK: Memberikan opsi antara biaya historis dan nilai wajar, tetapi lebih bersikap konservatif terutama ketika terdapat keterbatasan informasi atau pasar aktif. Penerapan nilai wajar dalam PSAK tidak seagresif IFRS, karena mengadaptasi kondisi lokal, sehingga seringkali perusahaan di Indonesia masih lebih memilih biaya historis kecuali untuk aset tertentu yang memenuhi kriteria keandalan.

- **Asumsi Entitas dan Kelangsungan usaha**

Keduanya memiliki dasar asumsi bahwa entitas ekonomi (laporan keuangan mencerminkan entitas yang terpisah dari pemiliknya) dan kelangsungan operasional (going concern), yang berarti entitas diharapkan dapat bertahan untuk waktu lama dan tidak memiliki rencana untuk likuidasi atau penghentian bisnis dalam waktu dekat. Perbedaannya:

- IFRS lebih ketat dalam menetapkan pengungkapan jika terdapat keraguan mengenai kelangsungan usaha.
- PSAK juga menetapkan perlunya pertimbangan going concern, tetapi pelaksanaan pengungkapannya dapat lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan regulator dan pengguna di Indonesia.

3. Indonesia sebaiknya tidak sepenuhnya mengadopsi kerangka kerja IFRS tanpa melakukan penyesuaian untuk konteks lokal. Alasan utamanya adalah karena keadaan ekonomi, sosial, dan tingkat perkembangan pasar di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang menjadi dasar IFRS. Pasar keuangan yang masih dalam tahap berkembang, adanya batasan likuiditas pada aset tertentu, serta karakteristik yang berbeda dari pengguna laporan keuangan domestik, membutuhkan pendekatan yang lebih realistis dan berhati-hati, sebagaimana diatur dalam PSAK. Penyesuaian lokal ini sangat penting agar laporan keuangan yang disusun dianggap andal, relevan, dan dapat dipercaya oleh pengguna di Indonesia, serta mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Mengadopsi IFRS secara keseluruhan tanpa penyesuaian dapat menyebabkan ketidakpastian dan fluktuasi yang tidak mencerminkan realitas ekonomi di Indonesia, yang dapat mengurangi potensi investasi dan kepercayaan pasar lokal. Oleh karena itu, melakukan penyesuaian pada kerangka konseptual dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan tingkat kematangan pasar adalah sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara transparansi global dan relevansi lokal.